



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 16
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / Ke-3
Dengan	: <b>Menteri Sosial RI</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Selasa, 30 Januari 2018</b>
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.</b>
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 2. Isu-isu Aktual
Hadir	: 1. .... orang dari 50 orang Anggota 2. Menteri Agama beserta jajarannya

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum. sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

3. Rapat di skors pada pukul 16.50 wib dan dilanjutkan kembali pukul 17.07 wib.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda “**Evaluasi APBN TA 2017 dan Isu-isu Aktual**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai realisasi Pagu Tahun Anggaran 2017 atas capaian dan target sasaran sesuai penyerapan anggaran sebesar Rp 17.164.771.258.979,- (*Tujuh belas triliun seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau 97,30% dari pagu anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp17.641.525.106.000,- (*Tujuh belas triliun enam ratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus enam ribu rupiah*).
2. Berdasarkan penjelasan tertulis dan paparan yang disampaikan oleh Menteri Sosial RI mengenai evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI memberikan pandangan dan pendapat, antara lain, sebagai berikut:
  - a. melakukan evaluasi program di daerah yang didanai dari dana dekonsentrasi, sehingga terdapat koneksitas dan sinergi program Kementerian Sosial RI dengan Program Dinas Sosial yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - b. meningkatkan kemampuan pendamping kesejahteraan sosial dengan memberikan pelatihan, dukungan sarana prasarana dan kesejahteraannya, antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), *E-Warong*, dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
  - c. menyusun strategi penyusunan program yang tepat dan proporsional dalam penanganan kemiskinan perkotaan dan pedesaan;
  - d. melakukan evaluasi realisasi bantuan non tunai yang selama ini dilakukan melalui Himbara, sehingga penyalurannya lebih cepat dan optimal;

- e. perlunya segera dilakukan penelitian dampak (*output*) dan manfaat (*outcome*) atas pelaksanaan program unggulan Kementerian Sosial RI, diantaranya PKH, KUBE, *E-Warong*, dan RTLH; dan
- f. segera dilakukan akurasi data fakir miskin, karena masih adanya program yang tidak tepat sasaran dan/atau masih adanya anggota masyarakat yang seharusnya masuk kriteria penerima manfaat, tetapi tidak masuk sebagai Basis Data Terpadu.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota sebagai bahan melakukan perbaikan program dan kinerja.

3. Komisi VIII DPR RI memberi dukungan atas kebijakan Menteri Sosial RI untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kemitraan dan kinerja Kementerian Sosial RI, yaitu:

**Pertama**, mengembalikan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari kementerian lain yang semula menjadi program prioritas Kementerian Sosial dalam rangka mendukung percepatan penanganan kemiskinan.

**Kedua**, melakukan penyempurnaan data kemiskinan menjadi Basis Data Terpadu (BDT), sehingga semua program menggunakan BDT sebagai dasar menetapkan sasaran.

**Ketiga**, Pengembangan Sistem layanan dan Rujukan terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Status STKS menjadi Politeknik, Penyelenggaraan Asian Para Games 2018 dan Pengembangan peran Kementerian Sosial dalam penanganan kebencanaan baik dalam memberikan perlindungan sosial, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun program pasca bencana melalui pemulihan dan penguatan psikososial.

**Keempat**, percepatan dilakukannya akurasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2018 dalam waktu 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2018 untuk target 2,5 juta Rumah Tangga.

4. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi respon cepat Kementerian Sosial RI dan segera menyusun penanganan dan penyelesaian Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk dan Campak di Asmat dan di berbagai daerah yang lain serta mengantisipasi kejadian bencana di daerah yang berdampak sosial. Namun demikian hendaknya Menteri Sosial RI segera melakukan pemetaan daerah rawan sosial dan langkah-langkah antisipatif sehingga bergerak dan bertindak lebih cepat serta dapat meminimalisir dampak sosial yang timbul.
5. Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Sosial RI untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas kementerian terkait guna merespon serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI atas berbagai program dan kegiatan Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan di daerah.
6. Komisi VIII DPR RI mendukung gagasan Menteri Sosial RI melakukan inovasi, implementasi dan penyempurnaan program untuk membangkitkan semangat, motivasi, dan kemandirian hidup masyarakat sesuai dengan visi dan misi revolusi mental sebagai bagian dari respon atas masukan dari Komisi VIII DPR RI.

### **III. PENUTUP**

Rapat di tutup pukul 18.35 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**Ttd.**

**DR. M ALI TAHER, SH, M.HUM.**